



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II
DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TA 2024

KATA PENGANTAR



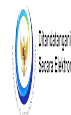
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja Triwulan II TA. 2024 Satker Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap dapat diselesaikan. Sebagai salah satu unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sejak Tahun 2013 telah memanfaatkan *Balanced Score Card* sebagai suatu alat dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan, sehingga seluruh unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. *Balanced Score Card* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Mengacu pada RPJMN 2021 – 2024 dan RKP tahun 2023, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan senantiasa mengoptimalkan pelaksanaan seluruh rencana aksi dengan efektif dan efisien, sesuai target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKP dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode satu tahun.

Semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 19 Juli 2024
Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Tri Aris Wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024 ditetapkan sebesar **Rp91.480.270.00**. Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024 ini adalah sebesar Rp24.959.998.641 atau telah mencapai 27,28% (sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id/>). Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2024 masuk dalam kategori Baik, yang ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar 107,42%.

Terkait dengan Indikator Kinerja, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja di tahun 2024, dimana pada triwulan II dilakukan perhitungan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Capaian TW II 2024	%
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal				
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya (Persen)	6	1,8	1,81	100
	2. Persentase Pembangunan SKPT (Persen)	85			
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing				
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	35			
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	2			
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28			
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48			
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	15			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Capaian TW II 2024	%
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	40			
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	78			
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	77			
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	78			
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal				
	12. Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	296			
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	90			
	14. Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	89			
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100			
	16. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100			
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan				
	17. Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan KP (Orang)	422			
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan				
	18. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	94			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Capaian TW II 2024	%
	19. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	84	79	82,55	104,49
	20. Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94	94	133,33	120
	21. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	80	80	104,17	120
	22. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98			

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024)

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU dan Tim Pengelola Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja triwulanan yang akan datang. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan diharapkan dapat mendukung kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
1.5 PERMASALAHAN UTAMA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN	4
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	5
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	7
2.2 PERJANJIAN KINERJA	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	14
3.2.1 <i>Sasaran Kegiatan (SK-1): Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Optimal</i>	15
3.2.2 <i>Sasaran Kegiatan (SK-2): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing</i>	17
3.2.3 <i>Sasaran Kegiatan (SK-3): Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal</i>	35
3.2.4 <i>Sasaran Kegiatan (SK-4): Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan</i>	58
3.2.5 <i>Sasaran Kegiatan (SK-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan</i>	59
BAB 4 PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024	7
2	Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan triwulan II tahun 2024	12
3	Capaian IKU "Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya" sampai dengan triwulan II tahun 2024	16
4	Perbandingan Capaian IKU "Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya" sampai dengan triwulan II tahun 2024	16
5	Identifikasi kriteria teknis dan operasional pelabuhan perikanan	20
6	Pelabuhan Perikanan yang melakukan input data pada aplikasi PIPP	24
7	Daftar Pelabuhan Perikanan yang melakukan input data pada aplikasi PIPP	28
8	Daftar Pelabuhan Pangkalan yang telah ditetapkan	33
9	Capaian IKU "Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar" sampai dengan triwulan II tahun 2024	58
10	Perbandingan Capaian IKU "Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar" sampai dengan triwulan II tahun 2024	58
11	Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan" sampai dengan triwulan I tahun 2024	58
12	Perbandingan Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan" sampai dengan triwulan II tahun 2024	59
13	Alokasi dan Realisasi Anggaran triwulan II tahun 2024	59

DAFTAR GAMBAR

1	Stuktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024	5
2	Perjanjian Kinerja Direktur Kelabuhanan Perikanan Tahun 2024	10
3	Dashboard Aplikasi Kinerjaku Dit. Kelabuhanan Perikanan Tahun 2024	11
4	IP ASN Tahun 2024 Direktorat Kelabuhanan Perikanan Triwulan II Tahun 2024	15

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan *outcome* berupa pengelolaan perikanan yang efisiensi dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah yang diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah pengembangan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Ketersediaan pelabuhan perikanan di sentra usaha perikanan tangkap sangat penting dalam mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan dan usaha pendukungnya. Pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur penilaian kinerja suatu Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung terciptanya tujuan dimaksud, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja. Dasar dari penyusunan laporan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 68/Permen-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama Triwulan II Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan

dalam suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan ke depan.

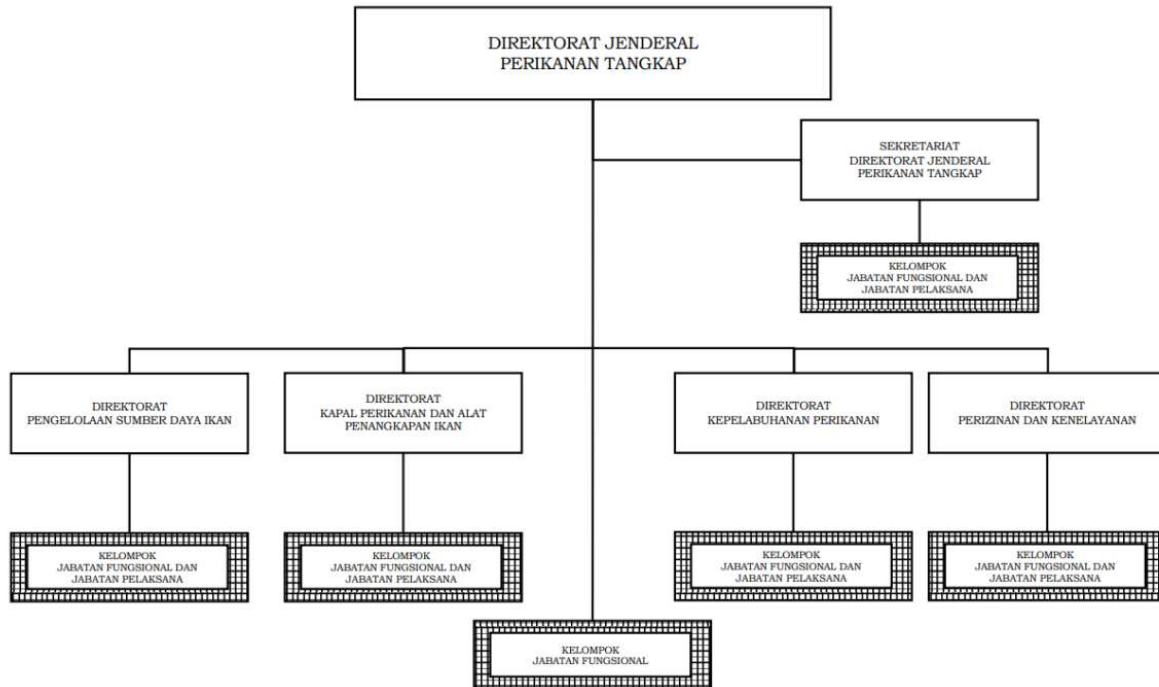
1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB V Bagian Keenam Pasal 67, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Sedangkan sesuai pasal 68, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
5. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Stuktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tahun 2024 (sesuai dengan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan).

1.4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah **“Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.
 - b. Persentase Pembangunan SKPT
2. Sasaran kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen);
 - b. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen);

- c. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen);
 - d. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen);
 - e. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen);
 - f. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen);
 - g. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen);
 - h. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen);
 - i. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen).
3. Sasaran kegiatan ketiga (SK-3) yang akan dicapai adalah **"Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal"**, dengan indikator kinerja:
- a. Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan);
 - b. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan);
 - c. Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala);
 - d. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen);
 - e. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen);
4. Sasaran kegiatan keempat (SK-4) yang akan dicapai adalah **"Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan"**, dengan indikator kinerja: Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP.
5. Sasaran kegiatan keempat (SK-5) yang akan dicapai adalah **"Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan"**, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)
 - b. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)
 - c. Persentase unit Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar;
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dan;
 - e. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN

Pelabuhan perikanan dalam pengelolaannya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, tetapi aspek lingkungan juga penting di perhatikan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Perpaduan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial merupakan suatu model pendekatan pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan yang riil demi

keberlanjutan pembangunannya dengan mengkombinasikan penerapan manajemen pelabuhan yang pro lingkungan.

Pengelolaan pelabuhan, dihadapkan pada tantangan dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang sistematis. Kurangnya pengaturan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, dewasa ini terasa sangat mengganggu dalam pengembangan potensi maritim yang dimiliki Indonesia.

Persoalan lain yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk mengelola Pelabuhan Perikanan, tanpa memperhatikan kemampuan dan ketersediaan fasilitas. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh keinginan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya.

Beberapa permasalahan pokok Pengelolaan Pelabuhan Perikanan telah teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya operasionalisasi Rencana induk pelabuhan perikanan nasional (RIPPN) pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan);
- b. kurangnya Syahbandar dan Petugas Syahbandar yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan;
- c. kurangnya jumlah pelabuhan perikanan yang tergabung Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), terutama Pelabuhan Perikanan yang ada syahbandarnya;
- d. terdapat operator PIPP yang dialih tugaskan ke Unit Kerja yang lain;
- e. rendahnya kepatuhan dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu dalam aplikasi PIPP;
- f. Belum optimalnya sinergi pengelolaan Pelabuhan Perikanan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2023 disusun sebagai berikut:

A. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

B. Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan

informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

C. Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

D. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

E. Bab 4 Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap disusun berdasarkan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional terkait dengan sektor kelautan dan perikanan dengan rencana strategis sebagai berikut:

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi DJPT tahun 2020-2024 adalah “terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadiann Berlandaskan Gotong-Royong”;

2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
- c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Sasaran Strategis Pembangunan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		WAKTU PENGUKURAN	TARGET
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	Triwulan	6
		2	Persentase Pembangunan SKPT	Tahunan	85
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3	Persentase lokasi Pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan(persen)	Tahunan	35
		4	Rencana Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (dokumen)	Tahunan	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	WAKTU PENGUKURAN	TARGET	
	5	Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat operasional optimum (persen)	Tahunan	28	
	6	Tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan (persen)	Tahunan	48	
	7	Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja baik (persen)	Tahunan	15	
	8	Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (persen)	Tahunan	40	
	9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (persen)	Tahunan	78	
	10	Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	Triwulan	77	
	11	Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (persen)	Tahunan	78	
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	12	Pelabuhan perikanan yang menerapkan penangkapan ikan terukur (pelabuhan)	Tahunan	296
		13	Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi (Pelabuhan)	Tahunan	90
		14	Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (nilai/skala)	Tahunan	89
		15	Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan fish market bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)	Tahunan	100
		16	Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan Pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep Eco Fishing Port yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)	Tahunan	100
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan	17	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	Tahunan	422
	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18	Nilai rekonsiliasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)	Tahunan	94
		19	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan perikanan (indeks)	Semester	84
		20	Persentase unit kerja Direktorat Kepelabuhanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Triwulan	94
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PENGUKURAN	TARGET
	22	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kelautan dan Perikanan (persen)	Triwulan 98

(Sumber: Direktorat Kelautan dan Perikanan, 2024)

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kelautan dan Perikanan menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 5 (lima) sasaran kegiatan dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL dirjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tri Aris Wibowo**
 Jabatan : Direktur Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
 Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,
Pihak Pertama
Direktur Kelautan dan Perikanan,



Tb. Haeru Rahayu



Tri Aris Wibowo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1 Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya (Persen)	6
	2 Persentase Pembangunan SKPT (Persen)	85
2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saling	3 Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	35
	4 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	2
	5 Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28
	6 Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48
	7 Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	15
	8 Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	40
	9 Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	78
	10 Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	77
	11 Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	78
	3 Pemenuhan prasarana pemungutan PNB perikanan tangkap yang optimal	12 Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)
13 Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNB Pascaproduksi (Pelabuhan)		90
14 Tingkat penerapan PNB Pascaproduksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)		89
15 Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)		100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16 Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan	17 Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan KP (Orang)	422
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	94
		19 IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	84
		20 Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94
		21 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	80
		22 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98

Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
 Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 118.869.120.000,-

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua : Pihak Pertama
 Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap : Direktur Kepelabuhanan Perikanan

 Tb. Haeru Rahayu  Tri Aris Wibowo

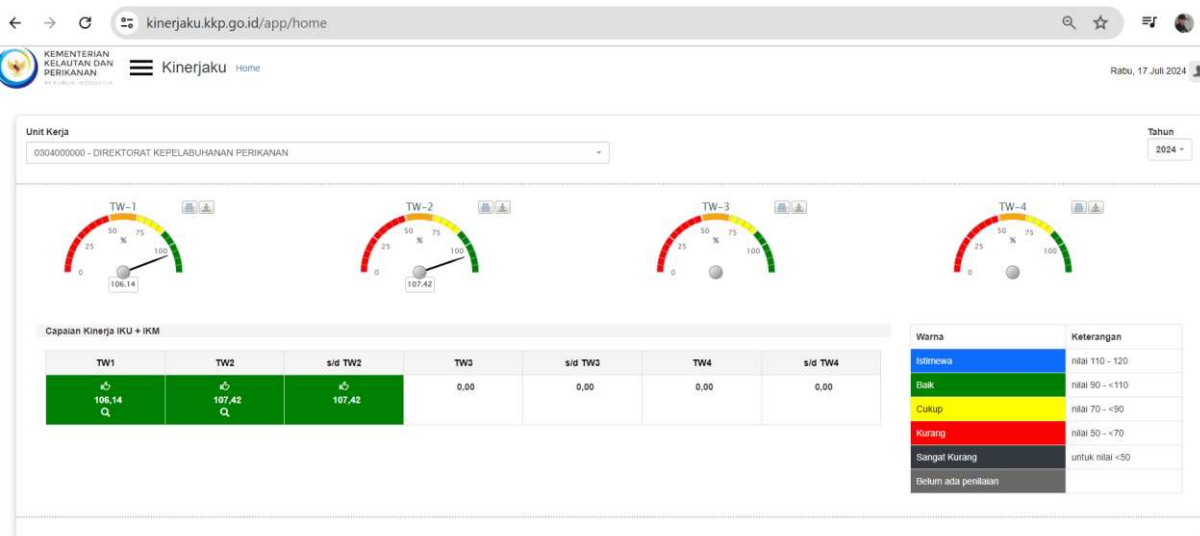
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktur Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024
 (Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024)

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kepelabuhanan Perikanan menitik beratkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 4 (empat) Indikator Kinerja untuk

menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II dalam bentuk dashboard sebagai berikut:



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan II Tahun 2024

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024)

Capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan II tahun 2024 masih dalam kategori baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK sebesar 107,42%. capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Pada triwulan II Tahun 2024, terdapat 4 dari 22 IKU Direktorat Kepelabuhanan yang dapat di hitung capaiannya. Ini dikarenakan 4 IKU tersebut targetnya di hitung dalam waktu triwulanan dan semesteran, sedangkan yang 19 IKU lain di hitung dalam waktu tahunan.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan II tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Waktu Pengukuran	Target	Target		
						Capaian		
						TW II	TW II	%
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	Triwulan	6	1,8	1,8	100
		2	Persentase Pembangunan SKPT (persen)	Tahunan	85			
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	35			
		4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	Tahunan	2			
		5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	Tahunan	28			
		6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	48			
		7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	Tahunan	15			
		8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	Tahunan	40			
		9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	78			
		10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	Tahunan	77			
		11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	Tahunan	77			

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Waktu Pengukuran	Target	Target			Capaian														
						TW II	TW II	%	TW II	TW II	%												
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	12	Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	Tahunan	296																		
												13	Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	Tahunan	90								
																14	Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	Tahunan	89				
																				15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	Tahunan	100
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan	17	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	Tahunan	422																		
												5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	Tahunan	94						
																		19	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	Semester	84	79	82,55
20	Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Triwulan	94	94	133,33	141,84																	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Waktu Pengukuran	Target	Target	Capaian	
					TW II	TW II	%
	21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	80	80	83,63	104,54
	22	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Tahunan	98			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), nilai yang diperoleh adalah sebesar **107,42**

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja adalah proses evaluasi yang mengukur sejauh mana suatu organisasi atau individu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam analisis ini, data kinerja dicermati untuk menilai pencapaian target, identifikasi masalah, dan perbaikan yang diperlukan. Dengan melibatkan pengukuran kuantitatif dan kualitatif, analisis capaian kinerja membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan strategis, dan pengembangan program perbaikan. Hal ini menjadi alat penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas suatu entitas, baik dalam sektor bisnis, pemerintahan, maupun sektor sosial, serta membantu memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pencapaian tujuan. Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Optimal

A. Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya

Sasaran Kegiatan Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan merupakan tujuan dari program Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, sasaran ini memiliki Indikator Kinerja, yaitu **Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.**

Indikator ini menunjukkan persentase pembinaan pengembangan pelabuhan perikanan guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. Adapun metode perhitungan yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan jumlah lokasi capaian pengembangan di Pelabuhan Perikanan berupa salah satu kegiatan:

1. Analisis dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan pelabuhan perikanan
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan
4. Pembinaan pembangunan di pelabuhan perikanan
5. Pengendalian pembangunan di pelabuhan perikanan
6. Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan
7. Supervisi Kegiatan Pembangunan

Indikator ini pada tahun Triwulan II Tahun 2024 ditargetkan sebesar 1,8%. Penghitungan didasarkan pada jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (**Rpp**) dibandingkan dengan jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah dan melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (**Rrippn**) 642 PP bersifat kumulatif.

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Rpp}}{\text{Rrippn}} \times 100\%$$

Pada triwulan II Tahun 2024, telah dilaksanakan pembahasan dan analisis dokumen rencana awal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik subbidang Perikanan Tangkap (pembangunan/pengembangan PP UPT Daerah. Selanjutnya telah dibahas mengenai pembahasan rencana pengembangan fasilitas PP UPT Pusat yang dilaksanakan di Yogyakarta dengan mengundang 22 Satuan Kerja (PP UPT Pusat dan PP Perintis). Untuk tahapan selanjutnya akan dilakukan penyiapan dokumen tender/pengadaan pelabuhan perikanan.

Tabel 3. Capaian IKU “Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)” sampai dengan triwulan II tahun 2024

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	1,8	1,8	100

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024)

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU “Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” sampai dengan triwulan II Tahun 2024

SS 1 Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal											
IKU 1 Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)											
Realisasi TW II 2019-2023					Realisasi 2024				Renstra DJPT		
TW II 2019	TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target TW II 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	8	3	6	1,8	1,8	100			

B. Persentase Pembangunan SKPT (Persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase progress pembangunan pelabuhan perikanan di SKPT guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Jumlah capaian progress pembangunan pelabuhan perikanan SKPT meliputi:

1. Penyiapan dokumen lelang pembangunan SKPT
2. Penandatanganan kontrak
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan konstruksi
4. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan konstruksi
5. Serah Terima Pekerjaan

Cara menghitung persentase progress Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah jumlah capaian progres Pembangunan di 4 lokasi SKPT dibagi dengan 4 lokasi SKPT.

$$PSKPT = \frac{\sum PFP}{4} \times 100\%$$

Pada Triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan perhitungan pada IKU Persentase Pembangunan SKPT, dikarenakan IKU ini ditetapkan ditargetkan tahunan. Namun, beberapa pekerjaan telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini pada triwulan II sebagai berikut:

1. SKTP Sabang
 - Telah dilakukan analisis dokumen perencanaan
 - Penyiapan tender; dan
 - Mereview hasil pemenang tender
2. SKPT Moa
 - Melaksanakan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPT Moa;
 - Melaksanakan pengendalian terhadap kontrak kritis yang sedang dialami SKPT Moa;

- Melakukan pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Minggu ke-61
- 3. SKPT Saumlaki
 - Melaksanakan persiapan serah terima parsial/sebagian terhadap bangunan yang sudah selesai dalam pelaksanaan pembangunannya;
 - Melaksanakan pendampingan terhadap reviu itjen atas Permohonan termin III Kontraktor penyedia;
 - Melakukan pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Minggu ke-77
- 4. SKPT Morotai
 - Melaksanakan pendampingan terhadap reviu itjen terkait administrasi Termin II SKPT Morotai;
 - Melakukan pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Minggu ke-64

3.2.2 Sasaran Kegiatan (SK-2): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing

A. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen).

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan rencana pembangunan dan/atau pengembangannya. Identifikasi pelabuhan perikanan meliputi:

1. Analisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan perikanan.
2. Pembahasan dan koordinasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Cara penghitungannya adalah Jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau **(Rppa)** pengembangannya dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (**Rrippn**)

Pada Triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan perhitungan pada IKU Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan, dikarenakan IKU ini ditetapkan targetnya tahunan. Namun kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen perencanaan Kantor Pelayanan Kesyahbandaran dan PNBP Pasca Produksi (KPSP) di 5 (lima) lokasi yaitu PP Muara Angke, PP Karangsong, PP Sorong, PP Baran dan PP Dobo berupa DED dan Gambar design sebagai dasar pelaksanaan konstruksi pembangunan KPSP.
2. Sinkronisasi block plan Pelabuhan Perikanan (PP) berdasarkan *master plan* dan kondisi eksisting yang sudah terbangun di 2 (dua) lokasi yaitu PPN Ternate dan PPN Brondong.
3. Penyusunan deliniasi (garis batas) wilayah PP di 2 (dua) lokasi yaitu PPN Ternate dan PPN Brondong.
4. Pembahasan rencana awal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik subbidang Perikanan Tangkap (pembangunan/pengembangan PP UPT Daerah)
5. Pembahasan rencana pengembangan fasilitas PP UPT Pusat yang dilaksanakan di Yogyakarta dengan mengundang 22 Satuan Kerja (PP UPT Pusat dan PP Perintis).

B. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)

Indikator ini menunjukkan tersedianya dokumen rencana dan konsep pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Jumlah dokumen perencanaan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan meliputi dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan diantaranya studi kelayakan, dokumen lingkungan, KKRL, WKOPP, masterplan dan DED.

Pada Tahun 2024, IKU Rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan ditetapkan target sebanyak 2 Dokumen, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan. Namun kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan survey lapangan dalam rangka penyusunan WKOPP PP Daero Majiko;
2. Penyusunan deliniasi (garis batas) PP Daero Majiko;
3. Pembahasan hasil identifikasi dan survey lapangan penyusunan WKOPP Daero Majiko;
4. Pembahasan lanjutan terkait penyusunan WKOPP PP Daero Majiko;
5. Menyiapkan surat rekomendasi Bupati dan Gubernur terkait permohonan alokasi lahan untuk WKOPP Daero Majiko;
6. Penandatanganan surat rekomendasi oleh Bupati dan Gubernur;
7. Penyerahan dokumen ke Bagian Hukum-Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap untuk ditindaklanjuti proses penetapan WKOPP oleh Biro Hukum.

C. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)

Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum dihitung berdasarkan capaian tingkat operasional pelabuhan perikanan dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN. Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional optimum dilihat dari beberapa aspek meliputi:

- a. Fasilitas minimal Pelabuhan perikanan;
- b. Kriteria teknis;
- c. Kriteria operasional;
- d. Kelembagaan;
- e. Sumber Daya Manusia; dan
- f. Anggaran Operasional

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II untuk mencapai target jumlah pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum antara lain:

1. Tingkat operasional optimum pelabuhan perikanan;

- a. Rapat Pembahasan telaahan RPERMEN KP dan kajian teknis tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya di Bidang Kepelabuhanan Perikanan tanggal 27 Maret 2024;
- b. Penyampaian Data Kapal yang Tersertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Tahun 2019 – 2023;
- c. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu – BPPMHKP nomor: B.477/DJPT.4/PI.330/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 perihal Permohonan data kapal yang berafiliasi dengan supplier pemasok bahan baku ke UPI yang memiliki nomor registrasi untuk ekspor ke UE;
- d. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 25 Maret 2024;

2. Nomor pendaftaran calon pembangun dan pengelola SPBUN;

- a. Surat pendafatran nomor rekomendasi calon pembangunan dan pengelola SPBUN sebanyak 33 surat di 13 Provinsi; dan
- b. Surat Direktur Kepelabuhan Perikanan kepada seluruh DKP Provinsi nomor: B.1225/DJPT.4/PI.320/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal permintaan laporan pengelolaan SPBUN di Provinsi.

3. Peningkatan atau penetapan kelas pelabuhan perikanan milik Pemerintah dan penetapan pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah;

- a. Kronologis Usulan Peningkatan Kelas dan Penetapan Pelabuhan Perikanan Yang Tidak Dibangun Oleh Pemerintah;

- b. Surat Direktur Kelabuhanan Perikanan nomor: B.309/DJPT.4/PI.340/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 kepada DKP Provinsi Jawa Tengah perihal Tanggapan Usulan Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Larangan;
- c. Surat Direktur Kelabuhanan Perikanan kepada 24 DKP Provinsi perihal Penetapan atau Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan agar melakukan identifikasi kriteria teknis dan operasional PP di provinsi masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5. Identifikasi kriteria teknis dan operasional Pelabuhan Perikanan.

No	Provinsi	Surat Dir. Kelabuhanan Perikanan	Tanggal	Proyeksi tahapan pembangunan, pengembangan, dan klasifikasi pelabuhan perikanan tahun 2024-2028
1	Aceh	B.376/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	18 pelabuhan perikanan yang akan menjadi PPI
2	Banten	B.323/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	6 PP yang akan menjadi PPI
3	Bengkulu	B.327/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	4 PP yang akan menjadi PPI
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	B.332/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPP
5	Gorontalo	B.377/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	3 PP yang akan menjadi PPI
6	Jawa Tengah	B.255/DJPT.4/PI.340/I/2024	22 Januari 2024	1 PPP yang akan menjadi PPN, 1 PP yang akan menjadi PPP dan 59 PP yang akan menjadi PPI
7	Jawa Timur	B.324/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	2 PPI yang akan menjadi PPP, 6 PP yang akan menjadi PPP, dan 9 PP yang akan menjadi PPI;
8	Kalimantan Barat	B.325/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	8 PP yang akan menjadi PPI
9	Kalimantan Tengah	B.331/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	6 PP yang akan menjadi PPI
10	Kalimantan Timur	B.329/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPI
11	Kepulauan Bangka Belitung	B.328/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	1 PP yang akan menjadi PPP dan 3 PP yang akan menjadi PPI
12	Maluku	B.382/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	8 PP yang akan menjadi PPI dan 1 CP yang akan menjadi PPI
13	Maluku Utara	B.381/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	9 PP yang akan menjadi PPI

No	Provinsi	Surat Dir. Kelabuhan Perikanan	Tanggal	Proyeksi tahapan pembangunan, pengembangan, dan klasifikasi pelabuhan perikanan tahun 2024-2028
14	Nusa Tenggara Timur	B.369/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPP, 7 PP yang akan menjadi PPI dan 11 CP yang akan menjadi PPI.
15	Papua	B.386/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	4 PP yang akan menjadi PPI
16	Papua Barat	B.383/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	3 PP yang akan menjadi PPI
17	Papua Barat Daya	B.385/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPI
18	Papua Tengah	B.384/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPI
19	Sulawesi Barat	B.378/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	1 PP yang akan menjadi PPP dan 2 PP yang akan menjadi PPI
20	Sulawesi Selatan	B.373/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	17 PP yang akan menjadi PPI
21	Sulawesi Tengah	B.379/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPI
22	Sulawesi Tenggara	B.372/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	21 PP yang akan menjadi PPI
23	Sulawesi Utara	B.371/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	10 PP yang akan menjadi PPI
24	Sumatera Barat	B.326/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	1 PPI yang akan menjadi PPP dan 3 PP yang akan menjadi PPI

- d. Rapat Koordinasi Penetapan atau Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Tahun 2024 pada tanggal 29 Februari 2024 dengan seluruh DKP Provinsi;
- e. Pembahasan Usulan Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Gesing di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY pada tanggal 04 Maret 2024.

4. Pengawasan dan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan

- a. Sosialisasi Implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (Selaraskan) pada tanggal 01 Februari 2024 kepada PP UPT Daerah dan PP Perintis;
- b. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan nomor: B.658/DJPT.4/PI.330/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 kepada PP UPT Daerah dan PP Perintis perihal Implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN);
- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis CPIB dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan serta K5 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada tanggal 05 - 08 Maret 2024;
- d. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan nomor B.1101/DJPT.4/PI.330/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 kepada PP UPT Pusat perihal Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tahun 2024;
- e. surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan nomor: B.1891/DJPT.4/TU.330/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi SELARASKAN dan Model Kolaborasi dan Inovasi Pengendalian Lingkungan (Kebersihan, Keindahan, Keamanan, Ketertiban, dan Keselamatan Kerja/K5) di Pelabuhan Perikanan: Seimbang, Kolaboratif dan Strategis (K5-SELARAS)
- f. Tim SELARASKAN Dit. Kepelabuhanan Perikanan ikut serta dalam penyelenggaraan penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat (PBUS) tahun 2024 mulai dari persiapan hingga verifikasi usulan termasuk pelabuhan perikanan UPT Pusat antara lain: PPS Cilacap, PPS Nizam Zachman, PPS Bungus, PPN Ternate, PPN Kwandang, PPN Brondong, PPN Kejawanan dan PPN Prigi;
- g. Melaksanakan verifikasi capaian dan evaluasi SELARASKAN triwulan II (dua) TA. 2024 di 22 PP UPT Pusat dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Verifikasi capaian dan evaluasi Selaraskan

No.	Pelabuhan Perikanan	April	Mei	Juni	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
1.	PPS Cilacap	99.06	99.7	99.65	298.41	99.47	SANGAT BAIK
2.	PPN Sibolga	98.83	99.3	99.43	297.56	99.19	SANGAT BAIK
3.	PPN Pemangkat	98.8	99.74	95.73	294.27	98.09	SANGAT BAIK

No.	Pelabuhan Perikanan	April	Mei	Juni	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
4.	PPN Kejawanan	98.87	98.2	95.8	292.87	97.62	SANGAT BAIK
5.	PPN Prigi	98.28	93.88	99.53	291.69	97.23	SANGAT BAIK
6.	PPN Pengambengan	98.4	98.05	95.03	291.48	97.16	SANGAT BAIK
7.	PPN Palabuhanratu	94.57	99.4	96.6	290.57	96.86	SANGAT BAIK
8.	PPN Kwandang	96.77	97	94.41	288.18	96.06	SANGAT BAIK
9.	PPP Teluk Batang	96.22	97.45	92.42	286.09	95.36	SANGAT BAIK
10.	PPN Sungailiat	93.92	92.54	95.71	282.17	94.06	SANGAT BAIK
11.	PPS Nizam Zachman Jakarta	88.52	93.95	94	276.47	92.16	SANGAT BAIK
12.	PPN Ternate	92.19	92.98	90.86	276.03	92.01	SANGAT BAIK
13.	PPS Bungus	78.42	95	95.91	269.33	89.78	SANGAT BAIK
14.	PPN Brondong	86.72	87.95	84.77	259.44	86.48	SANGAT BAIK
15.	PPS Bitung	84.19	88.86	82.4	255.45	85.15	SANGAT BAIK
16.	PPN Pekalongan	81	81	74.7	236.7	78.90	BAIK
17.	PPN Karangantu	92.95	99.34	39.12	231.41	77.14	BAIK
18.	PPN Ambon	85.5	86.92	52.15	224.57	74.86	BAIK
19.	PPS Belawan	57.45	90.6	73.84	221.89	73.96	BAIK
20.	PPN Tual	74.8	80.36	44.2	199.36	66.45	BAIK

No.	Pelabuhan Perikanan	April	Mei	Juni	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
21.	PPS Kendari	55.05	61.6	58.24	174.89	58.30	CUKUP
22.	PPN Tanjung Pandan	71.51	69.7	31.2	172.41	57.47	CUKUP

Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024 (diolah).

D. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)

Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan merupakan tingkat pelayanan perusahaan pelabuhan perikanan yang dilaksanakan terhadap UPT Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Perintis yang terdiri dari:

1. Tingkat kualitas waktu pelayanan penerbitan surat balasan terhadap rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan;
2. Tingkat kepatuhan penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan;
3. Tingkat pelayanan yang terstandarkan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 dalam mendukung indikator kinerja Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan antara lain:

1. Penyusunan SOP terkait penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan yang terdiri dari:
 - a. SOP yang penetapannya dilakukan oleh Kepala UPT Pelabuhan Perikanan atau Penanggung Jawab Pengelola Pelabuhan Perikanan Perintis:
 - 1) Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan berukuran <math><100\text{ m}^2</math> di UPT Pelabuhan Perikanan;
 - 2) Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan berukuran <math><100\text{ m}^2</math> di PP Perintis;
 - 3) Rekomendasi Penggunaan Tanah berukuran ≥ 100 s.d 2000 m^2 dan/atau Bangunan berukuran ≥ 100 s.d 200 m^2 di UPT Pelabuhan Perikanan;
 - 4) Rekomendasi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan berukuran ≥ 100 s.d 2000 m^2 di PP Perintis;
 - 5) Rekomendasi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan berukuran $\geq 2000\text{ m}^2$ di UPT Pelabuhan Perikanan;
 - 6) Rekomendasi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan berukuran $\geq 2.000\text{ m}^2$ di Pelabuhan Perikanan Perintis;
 - 7) Penerbitan Perjanjian Penggunaan Tanah atau Bangunan yang berukuran selain $<100\text{ m}^2$ di UPT Pelabuhan Perikanan; dan
 - 8) Penerbitan Perjanjian Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang berukuran selain $<100\text{ m}^2$ di Pelabuhan Perikanan Perintis.
 - b. SOP yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Kepelabuhanan Perikanan:

- 1) Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah Berukuran $\geq 100 \text{ m}^2$ s.d 2.000 m^2 dan/atau Bangunan $\geq 100 \text{ m}^2$ s.d 200 m^2 ; dan
 - 2) Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah Berukuran $\geq 2.000 \text{ m}^2$ dan/atau Bangunan $\geq 200 \text{ m}^2$.
2. Hasil draft SOP dapat dilihat melalui tautan http://ndrive.kkp.go.id/index.php/s/SOP_BOGOR;
 3. Telah dilakukan pengesahan terhadap SOP pelayanan yang dilakukan di Direktorat Kelabuhanan Perikanan:
 - a. Nomor SOP: B.417/DJPT.4/OT.310/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan nama SOP Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah Berukuran $\geq 100 \text{ m}^2$ s.d 2.000 m^2 dan/atau Bangunan $\geq 100 \text{ m}^2$ s.d 200 m^2 ;
 - b. Nomor SOP: B.434/DJPT.4/OT.310/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan nama SOP Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah Berukuran $\geq 2.000 \text{ m}^2$ dan/atau Bangunan $\geq 200 \text{ m}^2$.
 4. Berdasarkan surat Direktur Kelabuhanan Perikanan Nomor B.1467/DJPT.4/TU.330/IV/2024 tanggal 24 April 2024, telah dilaksanakan evaluasi perusahaan berupa penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan Triwulan I pada tanggal 2 – 3 Mei 2024 terhadap seluruh UPT Pusat Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Perintis;
 5. Melakukan proses sertifikasi manajemen pelayanan ISO 9001:2015 terhadap pelayanan yang dilakukan di Direktorat Kelabuhanan Perikanan meliputi pelayanan penerbitan persetujuan prinsip penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan dan pelayanan penetapan/peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan.

E. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja minimal baik berdasarkan aplikasi PIPP. Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator adalah 15 %, sehingga belum dilakukan penghitungan pada triwulan II Tahun 2024. Berikut data pelabuhan perikanan yang telah melakukan input data pada aplikasi PIPP periode bulan April sampai dengan Juni Tahun 2024.

Tabel 7. Pelabuhan Perikanan yang melakukan input data pada aplikasi PIPP

NO	PELABUHAN PERIKANAN	APRIL	MEI	JUNI	RATA-RATA	KATEGORI
1	PPS. Nizam Zachman Jakarta	90,00	92,00	95,00	92,33	SANGAT BAIK
3	PPS. Kendari	91,25	91,25	93,50	92,00	SANGAT BAIK
4	PPS. Cilacap	82,75	90,25	82,75	85,25	BAIK
5	PPS. Bungus	85,00	87,25	92,25	88,17	SANGAT BAIK

6	PPS. Bitung	89,75	91,50	96,00	92,42	SANGAT BAIK
7	PPS. Belawan	87,75	95,50	99,50	94,25	SANGAT BAIK
9	PPN. Ternate	95,25	96,25	96,25	95,92	SANGAT BAIK
10	PPN. Tanjungpandan	89,75	90,75	90,75	90,42	SANGAT BAIK
11	PPN. Sungailiat	86,50	88,50	95,75	90,25	SANGAT BAIK
12	PPN. Sibolga	94,75	94,75	98,25	95,92	SANGAT BAIK
13	PPN. Prigi	93,75	94,00	93,00	93,58	SANGAT BAIK
14	PPN. Pengambengan	92,50	91,00	98,25	93,92	SANGAT BAIK
15	PPN. Pemangkat	88,75	91,75	91,00	90,50	SANGAT BAIK
16	PPN. Pekalongan	92,00	92,75	91,75	92,17	SANGAT BAIK
17	PPN. Palabuhanratu	83,25	87,25	88,50	86,33	SANGAT BAIK
18	PPN. Muara Angke	67,50	71,50	72,75	70,58	BAIK
20	PPN. Kwandang	86,75	84,75	78,50	83,33	BAIK
21	PPN. Kejawanan	87,00	87,25	96,75	90,33	SANGAT BAIK
22	PPN. Karangantu	88,75	87,50	86,00	87,42	SANGAT BAIK
23	PPN. Idi	53,25	77,00	82,75	71,00	BAIK
24	PPN. Brondong	91,75	90,75	91,75	91,42	SANGAT BAIK
25	PPN. Ambon	86,25	89,00	91,50	88,92	SANGAT BAIK
26	PPP. Wonokerto	90,50	90,50	92,50	91,17	SANGAT BAIK
29	PPP. Teluk Batang	84,50	88,75	92,00	88,42	SANGAT BAIK
30	PPP. Tegalsari	94,00	95,00	96,00	95,00	SANGAT BAIK
31	PPP. Tawang	74,00	79,00	87,75	80,25	BAIK
32	PPP. Tasik Agung	96,25	96,00	97,50	96,58	SANGAT BAIK
33	PPP. Tamperan	87,50	90,50	91,75	89,92	SANGAT BAIK
34	PPP. Sungai Rengas	68,75	81,75	82,25	77,58	BAIK
35	PPP. Sorong	73,75	72,50	76,00	74,08	BAIK
36	PPP. Sadeng	65,75	69,25	73,00	69,33	BAIK
38	PPP. Puger	54,75	78,00	82,75	71,83	BAIK

39	PPP. Pondok Dadap	94,00	95,00	95,00	94,67	SANGAT BAIK
41	PPP. Muncar	93,00	94,00	91,75	92,92	SANGAT BAIK
43	PPP. Morodemak	71,00	82,00	94,25	82,42	BAIK
44	PPP. Mayangan	98,75	96,25	96,75	97,25	SANGAT BAIK
46	PPP. Lekok	69,50	72,25	80,25	74,00	BAIK
47	PPP. Labuhanhaji	61,75	74,50	79,75	72,00	BAIK
49	PPP. Labuhan Lombok	74,25	85,50	94,50	84,75	BAIK
52	PPP. Klidang Lor	97,75	96,50	99,75	98,00	SANGAT BAIK
53	PPP. Karimun Jawa	72,75	71,50	75,00	73,08	BAIK
55	PPP. Dobo	71,75	66,50	70,00	69,42	BAIK
57	PPP. Bulu	70,50	80,50	81,25	77,42	BAIK
58	PPP. Batulicin	87,00	92,00	93,00	90,67	SANGAT BAIK
59	PPP. Bajomulyo	95,00	96,25	96,50	95,92	SANGAT BAIK
60	PPP. Bacan	87,25	86,00	88,25	87,17	SANGAT BAIK
61	PPP. Asem Doyong	64,75	77,00	83,25	75,00	BAIK
67	PPI. Tanjung Limau	87,00	90,75	91,00	89,58	SANGAT BAIK
71	PPI. Selili	73,75	77,25	74,00	75,00	BAIK
72	PPI. Sambaliung	53,00	76,75	88,50	72,75	BAIK
73	PPI. Pusong	72,50	72,50	87,50	77,50	BAIK
74	PPI. Pasongsongan	72,00	64,00	63,75	66,58	BAIK
78	PPI. Muara Kintap	71,75	61,50	65,25	66,17	BAIK
80	PPI. Larangan	92,25	92,25	94,75	93,08	SANGAT BAIK
82	PPI. Kuala Pembuang	77,00	76,00	81,00	78,00	BAIK
87	PPI. Banjarmasin	69,50	80,50	85,50	78,50	BAIK
90	PP. Untia	67,00	86,25	82,00	78,42	BAIK
93	PP. Tual	36,00	77,50	90,25	67,92	BAIK
96	PP. Tenau Kupang	64,50	65,50	69,25	66,42	BAIK
98	PP. Teluk Awang	78,00	85,50	82,50	82,00	BAIK
99	PP. Tambakrejo	86,00	88,50	88,50	87,67	SANGAT BAIK
107	PP. Selat Lampa	77,75	81,75	91,50	83,67	BAIK
109	PP. Sebatik	77,50	80,50	83,50	80,50	BAIK
114	PP. Sangatta	72,25	80,50	82,75	78,50	BAIK
118	PP. Popoh	82,25	87,50	92,25	87,33	SANGAT BAIK
122	PP. Pancer	78,50	78,50	79,50	78,83	BAIK
128	PP. Manggar Baru	81,50	89,50	88,25	86,42	SANGAT BAIK

131	PP. Logending	74,50	86,00	87,50	82,67	BAIK
137	PP. Kuala Peukan Baro	66,25	67,50	68,75	67,50	BAIK
143	PP. Keude Meukek	52,25	76,50	77,00	68,58	BAIK
146	PP. Karangsong	67,25	68,25	67,25	67,58	BAIK
177	PP. Api-Api		70,50	70,50	70,50	BAIK

F. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang melakukan input data produksi kedalam aplikasi data PIPP. Cara menghitungnya adalah pelabuhan perikanan non calon pelabuhan perikanan (40% dari RIPP No. 132/2023) sebanyak 450 lokasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator 40% pada tahun 2024, sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan II. Namun, pada periode bulan April sampai dengan Juni 2024, sudah ada 177 pelabuhan perikanan yang melakukan input data di aplikasi PIPP sebagai berikut.

Tabel 8. Daftar PP yang melakukan input data di aplikasi PIPP.

NO	PELABUHAN PERIKANAN
1	PPS. Nizam Zachman Jakarta
3	PPS. Kendari
4	PPS. Cilacap
5	PPS. Bungus
6	PPS. Bitung
7	PPS. Belawan
9	PPN. Ternate
10	PPN. Tanjungpandan
11	PPN. Sungailiat
12	PPN. Sibolga
13	PPN. Prigi
14	PPN. Pengambengan
15	PPN. Pemangkat
16	PPN. Pekalongan
17	PPN. Palabuhanratu
18	PPN. Muara Angke
20	PPN. Kwandang
21	PPN. Kejawanan
22	PPN. Karangantu
23	PPN. Idi
24	PPN. Brondong
25	PPN. Ambon
26	PPP. Wonokerto
29	PPP. Teluk Batang

30	PPP. Tegalsari
31	PPP. Tawang
32	PPP. Tasik Agung
33	PPP. Tamperan
34	PPP. Sungai Rengas
35	PPP. Sorong
36	PPP. Sadeng
38	PPP. Puger
39	PPP. Pondok Dadap
41	PPP. Muncar
43	PPP. Morodemak
44	PPP. Mayangan
46	PPP. Lekok
47	PPP. Labuhanhaji
49	PPP. Labuhan Lombok
52	PPP. Klidang Lor
53	PPP. Karimun Jawa
55	PPP. Dobo
57	PPP. Bulu
58	PPP. Batulicin
59	PPP. Bajomulyo
60	PPP. Bacan
61	PPP. Asem Doyong
67	PPI. Tanjung Limau
71	PPI. Selili
72	PPI. Sambaliung
73	PPI. Pusong
74	PPI. Pasongsongan
78	PPI. Muara Kintap
80	PPI. Larangan
82	PPI. Kuala Pembuang
87	PPI. Banjarmasin
90	PP. Untia
93	PP. Tual
96	PP. Tenau Kupang
98	PP. Teluk Awang
99	PP. Tambakrejo
107	PP. Selat Lampa
109	PP. Sebatik
114	PP. Sangatta
118	PP. Popoh
122	PP. Pancer
128	PP. Manggar Baru
131	PP. Logending
137	PP. Kuala Peukan Baro
143	PP. Keude Meukek

146	PP. Karangsong
177	PP. Api-Api

G. Tingkat Kinerja Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran pelabuhan perikanan adalah indikator yang dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan bobot penilaian 40%, dan peningkatan jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan kesyahbandaran dengan bobot penilaian 60%.

Peran Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, meliputi:

1. Menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan
2. Memberikan persetujuan kepada nakhoda untuk melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya guna menghindari kecelakaan kapal dan jatuhnya korban
3. Mengatur kedatangan kapal perikanan dan mengatur penempatan kapal perikanan di dermaga maupun kolam pelabuhan
4. Mengawal perlindungan nelayan antara lain melalui pelaksanaan PKL dan asuransi/jaminan sosial
5. Mendorong peningkatan Pendapatan Negara/Daerah melalui PNPB atau PAD serta pengawalan terhadap PPN untuk penggunaan BBM industri bagi kapal perikanan
6. Memastikan kapal perikanan telah membayar PNPB pasca produksi pada saat penerbitan PB
7. Mendorong pelaksanaan ekspor produk perikanan melalui pemeriksaan sertifikat ikan hasil tangkapan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 21 Tahun 2024 dan 23 Tahun 2024 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, jumlah SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang berasal dari UPT Pusat sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang dan yang berasal dari UPT Daerah sebanyak 77 orang.

Dari 585 (lima delapan puluh lima) pelabuhan perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan, hanya 256 (dua ratus lima puluh enam) pelabuhan perikanan yang memiliki penempatan dan pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang mana pada periode Januari – Juni 2024 melalui aplikasi TemanSPB telah menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal sebanyak 84.626 surat dan Persetujuan Berlayar sebanyak 84.861 surat.

SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan selain menjaga keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan yang berangkat dari pelabuhan perikanan juga untuk mengawal pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan kegiatan PNPB Pasca Produksi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang ada di seluruh Indonesia, sehingga masih membutuhkan penambahan SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan guna pelaksanaan kegiatan prioritas KKP dimaksud.

Guna memenuhi kekurangan SDM Syahbandar tersebut, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tengah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada 30 (tiga puluh) orang pegawai UPT Pusat yang bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, Kementerian Perhubungan. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemenuhan SDM Syahbandar yang akan ditugaskan dan ditempatkan di pelabuhan perikanan.

Indikator kinerja ini perhitungannya dilakukan secara tahunan, dengan target ditetapkan sebesar 78%, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan diperhitungan.

H. Tingkat Kinerja Pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement (PSMA)* (Persen)

Indikator Tingkat kinerja pelayanan kapal perikanan yang dilalui melalui mekanisme *Port State Measures Agreement (PSMA)* adalah Tingkat kinerja pelayanan kapal berbendera asing yang di layani melalui mekanisme PSMA dan dihitung berdasarkan dua komponen berikut:

1. Jumlah SDM yang memahami penerapan PSMA, dengan bobot penilaian 30%; dan
2. Survey kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan AREP, dengan bobot penilaian 70%.

Port State Measures (PSM) adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Manfaat penerapan PSM, antara lain:

1. **Meningkatkan kendali** dan melengkapi upaya Negara-negara bendera dalam memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan hukum internasional – hal ini memberikan kesempatan bagi Negara-negara pelabuhan untuk memeriksa dan memverifikasi kapal-kapal yang meminta izin untuk memasuki pelabuhan, atau yang sudah berada di pelabuhan, belum terlibat IUU fishing.
2. **Kerjasama dan pertukaran informasi** yang lebih baik dan efektif antar negara pantai, negara bendera dan organisasi dan pengaturan pengelolaan perikanan regional (RFMOs).

3. **Berkontribusi pada penguatan pengelolaan dan tata kelola perikanan di semua tingkatan.** Menerapkan langkah-langkah negara pelabuhan melalui undang-undang nasional akan memberikan insentif untuk menetapkan prosedur yang terkoordinasi dan memfasilitasi kerja sama antarlembaga.
4. **Memberikan pengaruh positif terhadap konservasi dan pengelolaan perikanan** dengan berkontribusi terhadap pengumpulan data yang lebih akurat dan komprehensif, meningkatkan pelaporan kapal kepada administrasi nasional dan RFMO dan memfasilitasi penerapan standar ketenagakerjaan, keselamatan dan aturan internasional yang lebih ketat pada kapal.
5. **Dapat mencegah ikan yang ditangkap dari kegiatan IUU fishing** mencapai pasar nasional dan internasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 52/KEPMEN-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur, ditunjuk 4 (empat) lokasi pelaksana PSM di Indonesia, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
2. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Sumatera Barat
3. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung di Sulawesi Utara
4. Pelabuhan Umum Benoa di Bali

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku Otoritas *Port State Measures* Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan dan Keanggotaan Unit Pelaksana *Port State Measures* terdiri dari Sekretariat Otoritas PSM dan Tim Inspeksi PSM sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang yang sudah dilatih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 39/PERMEN-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur, pada Pasal 8 disebutkan bahwa setiap kapal berbendera asing yang akan masuk ke pelabuhan harus mengajukan permohonan masuk ke pelabuhan secara tertulis kepada Sekretariat Otoritas PSM. Permohonan masuk ke pelabuhan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 x 24 jam sebelum kapal asing mau ke pelabuhan.

Sekretariat otoritas PSM yang diketuai oleh Direktur Kepelabuhanan Perikanan akan menganalisa permohonan masuk termasuk meminta informasi tambahan dari negara bendera, negara pantai, negara pelabuhan lainnya, RFMO dan organisasi Internasional lainnya. Hasil Analisa berupa **PERSETUJUAN** masuk atau **PENOLAKAN**. Persetujuan masuk atau penolakan akan disampaikan kepada Koordinator PSM, Nakhoda, Agen Pelayaran, negara bendera, negara pantai, RFMO dan organisasi internasional terkait. Pelayanan penerbitan notifikasi penerimaan kapal asing masuk untuk periode Januari s.d Juni 2024 sebanyak 36 (tiga puluh enam) surat notifikasi dengan jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 27 kapal berbendera Jepang. Adapun tujuan masuk ke pelabuhan adalah dalam rangka pergantian crew, pengisian bahan bakar dan supply makanan.

Indikator kinerja ini perhitungannya dilakukan secara tahunan, dengan target ditetapkan sebesar 77%, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan diperhitungan.

I. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dihitung berdasarkan:

1. Peningkatan kapasitas SDM petugas SHTI yang ditetapkan, dengan bobot penilaian 30%;
2. Peningkatan jumlah SDM Operator LA, dengan bobot penilaian 50%; dan
3. Jumlah verifikasi SHTI dari negara importir, dengan bobot penilaian 20%.

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Seluruh produk perikanan yang berasal dari hasil tangkapan ikan di laut menggunakan kapal penangkap ikan dan diekspor ke negara pasar yang mempersyaratkan dokumen ketertelusuran hasil tangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung harus dilengkapi dengan *Catch Certificate* atau Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan Otoritas Kompeten Lokal Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Pernyataan Pengolahan ditunjuk 32 (tiga puluh dua) Otoritas Kompeten Lokal (OKL) penerbit SHTI. Saat ini terdapat 51 (lima puluh satu) orang petugas SHTI yang telah dilatih.

Kendala dan Permasalahan dalam penerapan SHTI, diantaranya:

1. Seringnya permintaan verifikasi keabsahan SHTI dari negara tujuan ekspor
 - Verifikasi terhadap keabsahan dokumen SHTI, hal ini karena adanya kesalahan ketik pada saat menuliskan dokumen SHTI baik terkait dengan jumlah ikan, periode penangkapan dll.
 - Verifikasi terhadap nama kapal penangkap ikan, daerah penangkapan, produk hasil tangkapan dan izin penangkapannya termasuk pendaftaran kapal perikanan di RFMO.
2. Adanya kendala dalam melakukan verifikasi terhadap keaslian *Catch Certificate* asal negara Russia
 - Otoritas kompeten Indonesia (Ditjen PDS) sudah melakukan verifikasi dengan OK negara Russia, tetapi negara Russia tidak memberikan jawaban secara administrasi terkait hal tersebut dikarenakan Indonesia belum melakukan Kerjasama dengan Rusia.
 - Hal ini menjadi salah satu kendala, dimana produk sudah dikirim oleh eksportir ke negara tujuan.
3. Ada beberapa Kode HS yang ada di system SHTI yang tidak sama dengan kode HS yang ada pada *Health Certificate*
 - Pada aplikasi SHTI hanya dapat mengakomodir 6 digit pertama saja apabila ada perbedaan kode HS.
 - Perlu adanya penyamaan pemberian kode HS, sehingga ada keseragaman yang digunakan di KKP.

4. Stake holder menghadapi kendala terkait nama latin jenis ikan
 - Lembar awal sudah tercantum nama latin spesies spesifik, tetapi buyer meminta agar nama latin spesies tersebut cukup sampai genus saja dicantumkan di lembar SHTI

Indikator kinerja ini perhitungannya dilakukan secara tahunan, dengan target ditetapkan sebesar 78%, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan diperhitungan.

3.2.3 Sasaran Kegiatan (SK-3): Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal

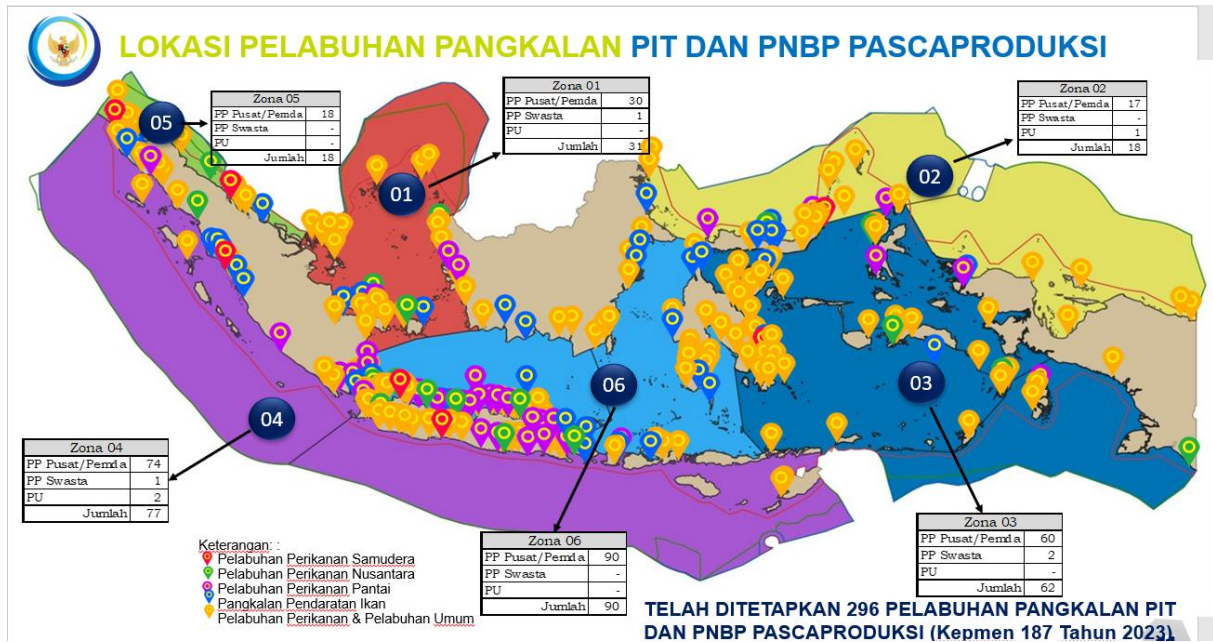
A. Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)

Pelabuhan pangkalan yang menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) adalah pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi kriteria yaitu lokasi pangkalan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan penangkapan ikan terukur tahun 2024 didasarkan pada Surat Edaran Nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023 tentang Relaksasi Kebijakan Pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur. Beberapa poin dalam Surat Edaran ini antara lain sebagai berikut:

1. Kuota. Kuota penangkapan ikan dan sertifikat kuota penangkapan ikan akan dilaksanakan pada musim penangkapan ikan tahun 2025
2. PNBP Kuota ditunda/belum dapat dilaksanakan sampai dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur
3. Pelabuhan Pangkalan sesuai domisili/usaha tempat tinggal sampai dengan 31 Desember 2024.
4. Alih muatan diperbolehkan sesuai SE B.1049/MEN-KP/VII/2023
5. Perubahan SIUP
 - Izin Pusat s.d 31 Desember 2023
 - Izin Daerah s.d 31 Desember 2024, Gubernur wajib melaporkan per triwulan
6. Migrasi Perizin Berusaha dilanjutkan sampai dengan 31 Desember 2024
7. SKKP (VMS). Pelaksanaan SPKP hasil migrasi perizinan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024.

Indikator kinerja ini perhitungannya dilakukan secara tahunan, dengan target ditetapkan sebesar 296 Pelabuhan, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan diperhitungan. Berikut daftar 296 pelabuhan pangkalan yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP 187 Tahun 2023).



Gambar 4. Lokasi pelabuhan pangkalan PIT dan PNB Pascaproduksi (Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024.)

Tabel 9. Daftar Pelabuhan Pangkalan yang telah ditetapkan.

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
1	PP Kuala Tungkal	Provinsi Jambi	Zona 01	UPTD	Pendukung
2	PP Nipah Panjang	Provinsi Jambi	Zona 01	UPTD	Pendukung
3	PPN Pemangkat	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPT Pusat	Utama
4	PPP Sungai Rengas/ PP Sungai Jawi	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD dan UPTD	Pendukung
5	PPP Teluk Batang	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPT Pusat	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
6	PP Kuala Mempawah	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
7	PP Kuala Singkawang	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
8	PP Selakau	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
9	PP Suka Bangun	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
10	PP Sungai Duri	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
11	PP Sungai Kakap	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
12	PPN Sungailiat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPT Pusat	Pendukung
13	PPN Tanjungpandan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPT Pusat	Pendukung
14	PPP Muara Sungai Baturusa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
15	PPI Manggar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
16	PPI Sungai Selan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
17	PP Kurau	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
18	PP Sadai	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
19	PP Selat Nasik	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
20	PPI Tarempa	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
21	PP Baran	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
22	PP Bareleng	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	Swasta	Utama
23	PP Dompok	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
24	PP Kijang Bintan	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
25	PP Moro	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
26	PP Pering Ranai	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
27	PP Selat Lampa	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	PP Perintis	Utama
28	PP Tajur Biru	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
29	PPI Sungsang	Provinsi Sumatera Selatan	Zona 01	UPTD	Pendukung
30	PP Jakabaring	Provinsi Sumatera Selatan	Zona 01	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
31	PP Sungai Lumpur	Provinsi Sumatera Selatan	Zona 01	UPTD	Pendukung
32	PPN Kwandang	Provinsi Gorontalo	Zona 02	UPT Pusat	Utama
33	PPI Gentuma	Provinsi Gorontalo	Zona 02	UPTD	Pendukung
34	PPI Sambaliung	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 02	UPTD	Pendukung
35	PP Sebatik	Provinsi Kalimantan Utara	Zona 02	PP Perintis	Pendukung
36	PP Tengkeyu II	Provinsi Kalimantan Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
37	PP Fandoi	Provinsi Papua	Zona 02	UPTD	Utama
38	PP Hamadi Jayapura	Provinsi Papua	Zona 02	UPTD	Pendukung
39	PP Waiya Depapre	Provinsi Papua	Zona 02	UPTD	Pendukung
40	PP Sanggeng	Provinsi Papua Barat	Zona 02	UPTD	Pendukung
41	PP Waharia	Provinsi Papua Tengah	Zona 02	UPTD	Pendukung
42	PPP Ogotua	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 02	UPTD	Pendukung
43	PPP Tumumpa	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
44	PP Amurang	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
45	PP Dagho	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
46	PP Likupang	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
47	PP Salibabu	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
48	PP Ulu	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
49	PU Labuhan Uki	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	Umum	Pendukung
50	PPI Tenda	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
51	PPI Talamuta	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
52	PP Inengo	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
53	PP Marisa	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
54	PPN Ambon	Provinsi Maluku	Zona 03	UPT Pusat	Utama
55	PPN Tual	Provinsi Maluku	Zona 03	UPT Pusat	Utama
56	PPP Dobo	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Utama
57	PPI Banda	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
58	PP Benjina	Provinsi Maluku	Zona 03	Swasta	Utama
59	PP Eri	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
60	PP Kalar Kalar	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
61	PP Kelfik Taar	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
62	PP Masarete	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
63	PP Masohi	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
64	PP Piru	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
65	PP Tamher Timur	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
66	PP Tual	Provinsi Maluku	Zona 03	Swasta	Utama

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
67	PP Tulehu	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
68	PP Ukurlaran	Provinsi Maluku	Zona 03	PP Perintis	Pendukung
69	PP Wetar	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
70	PPN Ternate	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPT Pusat	Utama
71	PPP Bacan	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
72	PPP Tobelo	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
73	PP Daeo Majiko	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	PP Perintis	Pendukung
74	PP Dufa-Dufa	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
75	PP Goto	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
76	PP Dulanpokpok	Provinsi Papua Barat	Zona 03	UPTD	Pendukung
77	PPP Sorong	Provinsi Papua Barat Daya	Zona 03	UPTD	Pendukung
78	PP Klademak	Provinsi Papua Barat Daya	Zona 03	UPTD	Pendukung
79	PPN Merauke	Provinsi Papua Selatan	Zona 03	PP Perintis	Utama
80	PP Poumako	Provinsi Papua Tengah	Zona 03	UPTD	Utama
81	PPI Pagimana	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
82	PPI Paranggi	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
83	PP Ampana	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
84	PP Bahari	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
85	PP Bente	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
86	PP Bualemo	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
87	PP Kolonodale	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
88	PP Mato	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
89	PP Moahino	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
90	PP Moilong	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
91	PP Toili	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
92	PPS Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPT Pusat	Utama
93	PPI Sodohoa	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
94	PP Laino	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
95	PP Langara	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
96	PP Lasolo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
97	PP Minaminanga	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
98	PP Molawe	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
99	PP Numana	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
100	PP Pasarwajo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
101	PP Rumbia Tengah	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
102	PP Sampolawa	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
103	PP Soropia	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
104	PP Tondasi	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
105	PP Torobulu	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
106	PP Wameo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
107	PPS Bitung	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPT Pusat	Utama
108	PP Atep Oki	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
109	PP Belang	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
110	PP Dodepo	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
111	PP Kema	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
112	PPS Lampulo	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Utama
113	PPP Labuhanhaji	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
114	PPI Ujong Baroeh	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
115	PPI Ujung Serangga	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
116	PP Anak Laut	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
117	PP Keude Meukek	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
118	PP Kuala Tuha	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
119	PP Lhok Bengkuang	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
120	PP Rigah	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
121	PP Sawang Ba'u	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
122	PP Teluk Sinabang (Lugu)	Provinsi Aceh	Zona 04	PP Perintis	Pendukung
123	PPN Pengambengan	Provinsi Bali	Zona 04	UPT Pusat	Utama
124	PPI Kedonganan	Provinsi Bali	Zona 04	UPTD	Pendukung
125	PU Bena	Provinsi Bali	Zona 04	Umum	Pendukung
126	PPP Labuan	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
127	PP Binuangeun	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
128	PP Cikeusik	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
129	PP Panimbang	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
130	PP Sidamukti	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
131	PPP Pulau Baai	Provinsi Bengkulu	Zona 04	UPTD	Pendukung
132	PPP Sadeng	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Zona 04	UPTD	Pendukung
133	PP Gesing	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Zona 04	UPTD	Pendukung
134	PPN Palabuhanratu	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPT Pusat	Utama
135	PP Batukaras	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
136	PP Cikidang	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	PP Perintis	Pendukung
137	PPP Cilauteureun	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
138	PP Jayanti	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
139	PP Pamayangsari	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
140	PP Ranca Buaya	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
141	PP Ujung Genteng	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
142	PPS Cilacap	Provinsi Jawa Tengah	Zona 04	UPT Pusat	Utama
143	PP Logending	Provinsi Jawa Tengah	Zona 04	UPTD	Pendukung
144	PPN Prigi	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPT Pusat	Pendukung
145	PPP Muncar	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
146	PPP Pondok Dadap	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
147	PPP Puger	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
148	PPP Tamperan	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
149	PP Grajagan	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
150	PP Pancer	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
151	PP Popoh	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
152	PP Sine	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
153	PP Tambakrejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
154	PP Tawang	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
155	PP Tegalrejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
156	PP Watu Ulo	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
157	PU Tanjung Wangi/PP Masami	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	Umum dan Swasta	Pendukung
158	PPP Kota Agung	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
159	PPP Lempasing	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
160	PPI Kalianda	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
161	PPI Ketapang	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
162	PPI Muara Piluk Bakauheni	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
163	PPI Rangai	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
164	PP Bengkunt	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
165	PP Durian	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
166	PP Kramat	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
167	PP Kuala Stabas Krui	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
168	PP Kunjir	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
169	PP Way Muli	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
170	PPP Labuhan Lombok	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
171	PPI Tanjung Luar	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
172	PP Sape	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
173	PP Soroadu	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
174	PP Teluk Awang	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	PP Perintis	Utama
175	PP Amagarapati	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
176	PP Oeba	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
177	PP Tenau	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
178	PPS Bungus	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPT Pusat	Utama
179	PPI Air Bangis	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
180	PPI Carocok Tarusan	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
181	PPI Kambang	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
182	PPI Sasak	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
183	PPI Sikakap	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
184	PPI Tiku	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
185	PP Pasir Baru	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
186	PP Surantiah	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
187	PPN Sibolga	Provinsi Sumatera Utara	Zona 04	UPT Pusat	Utama
188	PPI Pulo Tello	Provinsi Sumatera Utara	Zona 04	UPTD	Pendukung
189	PPN Idi	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
190	PPI Peudada	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
191	PPI Pusong	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
192	PP Ie Meulee	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
193	PP Krueng Mane	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
194	PP Kuala Langsa	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
195	PP Kuala Peukan Baro	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
196	PP Kuala Tari	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
197	PP Lambada	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
198	PP Meureudu	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
199	PP Pante Raja	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
200	PP Seuneubok Baroh	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
201	PP Ujung Blang	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
202	PPI Dumai	Provinsi Riau	Zona 05	UPTD	Pendukung
203	PPS Belawan	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPT Pusat	Utama
204	PPI Tanjung Balai Asahan	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPTD	Pendukung
205	PP Tanjung Tiram	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPTD	Pendukung
206	PPP Labu	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPTD	Pendukung
207	PPI Sangsit	Provinsi Bali	Zona 06	UPTD	Pendukung
208	PPN Karangantu	Provinsi Banten	Zona 06	UPT Pusat	Pendukung
209	PP Cituis	Provinsi Banten	Zona 06	UPTD	Pendukung
210	PP Kronjo	Provinsi Banten	Zona 06	UPTD	Pendukung
211	PP Pulokali	Provinsi Banten	Zona 06	UPTD	Pendukung
212	PPS Nizam Zachman	Provinsi DKI Jakarta	Zona 06	UPT Pusat	Utama
213	PPN Muara Angke	Provinsi DKI Jakarta	Zona 06	UPTD	Pendukung
214	PPN Kejawanan	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPT Pusat	Utama
215	PPP Muara Ciasem	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
216	PPP Blanakan	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
217	PPP Bondet	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
218	PPP Ciparage	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
219	PPP Eretan	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
220	PP Dadap	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
221	PP Gebang Mekar	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
222	PP Karangsong	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
223	PP Pal Jaya	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
224	PPN Pekalongan	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPT Pusat	Pendukung
225	PPP Asemtoyong	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
226	PPP Bajomulyo	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Utama
227	PPP Karimunjawa	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
228	PPP Klidang Lor	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
229	PPP Morodemak	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
230	PPP Tasik Agung	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
231	PPP Tawang	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
232	PPP Tegalsari	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Utama
233	PPP Wonokerto	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
234	PPI Larangan	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
235	PP Karanganyar	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
236	PP Kluwut	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
237	PP Pulolampes	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
238	PP Sarang	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
239	PP Tanjung Sari	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
240	PP Ujung Batu	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
241	PPN Brondong	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPT Pusat	Utama
242	PPP Bulu	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
243	PPP Lekok	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
244	PPP Mayangan	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Utama
245	PPP Paiton	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
246	PPI Bawean	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
247	PPI Pasongsongan	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
248	PP Banyusangkah	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
249	PP Besuki	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
250	PP Branta Pesisir	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
251	PP Camplong	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
252	PP Campurejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
253	PP Karang Agung	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
254	PP Ngemplakrejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
255	PP Palang	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
256	PP Panarukan	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
257	PP Pondok Mimbo	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
258	PP Randu Putih	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
259	PP Weru	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
260	PPP Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
261	PPI Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
262	PPI Kotabaru	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
263	PPI Muara Kintap	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
264	PPI Kuala Pembuang	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
265	PPI Kumai	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
266	PP Bahaur	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
267	PP Kuala Jelai	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
268	PPI Selili	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
269	PPI Tanjung Limau	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
270	PP Api-Api	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
271	PP Manggar Baru	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
272	PP Sangatta	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
273	PPP Labuhan Maringgai	Provinsi Lampung	Zona 06	UPTD	Pendukung
274	PPP Teladas	Provinsi Lampung	Zona 06	UPTD	Pendukung
275	PPI Kuala Penet	Provinsi Lampung	Zona 06	UPTD	Pendukung
276	PPI Teluk Santong	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
277	PP Soro Kempo	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
278	PPI Palipi	Provinsi Sulawesi Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
279	PP Kasiwa	Provinsi Sulawesi Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
280	PPI Birea	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
281	PPI Bonehalang	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
282	PP Beba	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
283	PP Bonto Bahari Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
284	PP Bonto Bahari Maros	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
285	PP Cempae	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
286	PP Kajang	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
287	PP Lappa	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
288	PP Lero	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
289	PP Lonrae	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
290	PP Polejiwa	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
291	PP Pontap	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
292	PP Untia	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	PP Perintis	Utama
293	PPI Donggala	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
294	PP Mapaga	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
295	PP Mangolo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 06	UPTD	Pendukung
296	PP Pitulua	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 06	UPTD	Pendukung

B. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)

Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi adalah pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

1. Lokasi pelabuhan pangkalan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. PNBP Pasca Produksi pada pelabuhan pangkalan telah direalisasikan.

Indikator kinerja pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi ini pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 90 Pelabuhan. Pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dilakukan perhitungan, dikarenakan target di ukur dalam waktu tahunan.

C. Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan (Nilai/Skala)

Kriteria yang dipenuhi oleh pelabuhan pangkalan dalam pelaksanaan PNBP Pasca Produksi. Kriteria ditetapkan berdasarkan skala 1-3 dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Kurang (<50%)
2. Sedang (50-<80%)
3. Baik (80-100%)

Kriteria:

1. Persentase ketersediaan SDM pendukung penerapan PNBP Pasca Produksi (ketersediaan SDM dibanding dengan kebutuhan SDM);
2. Persentase jumlah kapal perikanan izin pusat yang berkontribusi terhadap PNBP Pasca Produksi (jumlah kapal yang kontribusi/kapal izin pusat);
3. Persentase pendataan produksi ikan hasil tangkapan dari pendaratan kapal izin pusat (perbandingan pelabuhan perikanan yang menyampaikan data dengan kepatuhan input di PIPP).

Indikator tingkat penerapan PNBP pasca produksi di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan ini pada tahun 2024 ditargetkan senilai 89. Pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dilakukan perhitungan, dikarenakan target di ukur dalam waktu tahunan. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan pangkalan PIT dan PNBP Pasca Produksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan Pelabuhan Pangkalan PIT dan PNBP Pasca

Aspek	Permasalahan	Tantangan
Pengelolaan Data Penangkapan	- Ketidakakuratan pelaporan hasil tangkapan- Kesulitan memverifikasi data dari kapal-kapal kecil- Keterbatasan sistem pencatatan digital	- Mengimplementasikan sistem log book elektronik- Meningkatkan pengawasan dan verifikasi data tangkapan- Mengembangkan database terpadu untuk data penangkapan
Infrastruktur Pelabuhan	- Keterbatasan fasilitas pendaratan untuk kapal berukuran besar- Kurangnya area penyimpanan dan pengolahan yang memadai- Ketidaksihinggaan infrastruktur dengan standar internasional	- Merencanakan pengembangan pelabuhan jangka panjang- Memodernisasi fasilitas penyimpanan dan pengolahan- Menyesuaikan infrastruktur dengan standar internasional
Pengukuran dan Penimbangan	- Ketidakakuratan alat ukur dan timbangan- Manipulasi hasil penimbangan- Keterbatasan SDM terlatih untuk pengukuran yang akurat	- Mengadopsi teknologi pengukuran dan penimbangan modern- Menerapkan sistem pengawasan dan verifikasi silang- Meningkatkan pelatihan petugas pengukur dan penimbang
Traceability Produk	- Kesulitan melacak asal-usul produk perikanan- Keterbatasan sistem dokumentasi rantai pasok- Kurangnya standarisasi dalam pelabelan produk	- Mengimplementasikan sistem traceability digital- Mengembangkan standar dokumentasi rantai pasok yang komprehensif- Menerapkan sistem pelabelan produk yang terstandarisasi
Pengelolaan PNBP	- Kebocoran dalam penarikan PNBP- Ketidakpatuhan nelayan dalam pembayaran PNBP- Kompleksitas perhitungan PNBP	- Mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melalui edukasi- Menyederhanakan mekanisme perhitungan PNBP
Pengawasan Pascaproduksi	- Keterbatasan pengawasan terhadap pengolahan dan distribusi- Praktik ilegal dalam pengolahan produk perikanan- Kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas	- Memperkuat sistem pengawasan terpadu pascaproduksi- Meningkatkan kapasitas pengawas mutu dan keamanan pangan- Membangun mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga
Manajemen Mutu	- Penurunan kualitas produk selama penanganan dan penyimpanan- Ketidaksihinggaan dengan standar mutu internasional- Keterbatasan fasilitas pengujian mutu di pelabuhan	- Mengimplementasikan sistem manajemen mutu terpadu- Meningkatkan fasilitas cold chain dan penyimpanan- Mengembangkan laboratorium pengujian mutu yang terakreditasi
Pemasaran dan Distribusi	- Fluktuasi harga yang tidak terkendali- Keterbatasan akses pasar untuk nelayan kecil- Dominasi tengkulak dalam rantai distribusi	- Mengembangkan sistem informasi pasar yang real-time- Memfasilitasi akses pasar langsung untuk nelayan- Memperkuat koperasi nelayan dan asosiasi produsen
Teknologi Informasi	- Keterbatasan infrastruktur IT di pelabuhan- Resistensi terhadap adopsi teknologi baru- Keamanan data dalam sistem digital	- Meningkatkan investasi dalam infrastruktur IT- Menyelenggarakan program pelatihan dan sosialisasi teknologi- Mengimplementasikan sistem keamanan siber yang kuat
Regulasi dan Penegakan	- Tumpang tindih regulasi antar lembaga- Ketidaksihinggaan dalam interpretasi peraturan- Lemahnya penegakan regulasi	- Mengharmonisasi regulasi terkait pengelolaan pelabuhan dan PNBP- Menyusun pedoman interpretasi yang jelas- Memperkuat kapasitas dan wewenang penegak regulasi

Sumber: Direktorat Kelautan Perikanan, 2024.

D. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)

Indikator ini menunjukkan Persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional.

Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf Internasional ini meliputi kegiatan:

1. Proses penyiapan Loan Effective **(20%)**
 - Pembukaan rekening khusus (10%)
 - Proses permohonan pengisian *Initial Deposit* Rekening khusus dan permohonan nol (10%)
2. Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf Internasional **(80%)**
 - Pendampingan sekaligus fungsi administrasi untuk kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf internasional yang dikembangkan berupa penyusunan perencanaan pengembangan

pelabuhan perikanan (*review masterplan* dan DED) dan penyiapan pengawasannya (20%)

- Tanda tangan kontrak jasa konsultansi (PMC dan CMC) untuk lokasi proyek IFP-IFM Phase I (20%)
- Pengendalian perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf internasional (20%)
- Penyiapan dokumen tender pekerjaan konstruksi untuk 2 lokasi (PPN Kejawan dan PPN Pengembangan) (20%)

Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator ini adalah 100 pada tahun 2024. Pada triwulan II ini belum dilakukan perhitungan capaian, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dibuat *Annual Work Plan (AWP)* untuk tahun 2024 dan telah terbit *No Objection Letter (NOL)* nya.
2. Telah dilakukan pembukaan rekening khusus Proyek *IFP/IFM Phase I Lender IsDB* dan telah dilakukan pengisian *Initial Deposit* Rekening khusus.
3. Telah dilakukan kegiatan pelatihan manajemen proyek dengan tema "*Start Up Workshop Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Project Phase-I ISDB IDN 1055*" di Bali dengan melibatkan Instansi/Lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BAPPENAS, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, dan Lender IsDB.
4. Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk konsultan *Project Management Consultant (PMC)* dan *Construction Management Consultant (CMC)* dimana pada saat ini proses PBJ PMC dalam tahap penetapan pemenang dan proses PBJ CMC pada tahapan evaluasi teknis.

E. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep *Eco Fishing Port* (pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan) ini meliputi kegiatan:

1. Pendampingan sekaligus fungsi administrasi untuk kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan berupa penyusunan perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan (*review masterplan* dan *Basic Design*). (25%)
2. Pengendalian perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang yang berwawasan lingkungan (25%)
3. Tanda tangan kontrak jasa konsultansi TAO/PMC dan CMC. (25%)
4. Penyiapan dokumen tender pekerjaan jasa konstruksi untuk lokasi proyek Eco Fishing Port. (25%)

Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator ini adalah 100 pada tahun 2024. Pada triwulan II ini belum dilakukan perhitungan capaian, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan kegiatan "*Steering and Technical Committee Meeting Eco Fishing Port Project*" di Jakarta dengan melibatkan Instansi/Lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BAPPENAS, dan Lender AFD.
2. Telah dibuat *Annual Work Plan (AWP)* untuk tahun 2024 dan telah terbit *No Objection Letter (NOL)* nya.
3. Telah dilaksanakan Pelatihan Hibah Training in Port Management and Fisheries Sector ke Port Boulogne-Perancis yang melibatkan 4 lokasi pelabuhan perikanan yaitu PPS Belawan, PPS Bitung, PPS Kendari, dan PPS Cilacap.
4. Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (*International Competitive Bidding*) untuk konsultan *Technical Assistance to the Owner (TAO)* dan *Construction Management Consultant (CMC)* dimana pada saat ini proses PBJ TAO dalam tahap penetapan pemenang dan proses PBJ CMC pada tahapan evaluasi teknis.

3.2.4 Sasaran Kegiatan (SK-4): Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan

Indikator ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Tenaga kerja terlibat dalam indikator ini terdiri dari syahbandar, petugas syahbandar, petugas CPIB, dan petugas PIPP.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan atau tahunan dengan target indikator sebesar 422 pada tahun 2024. Pada triwulan I ini belum dilakukan perhitungan capaian.

3.2.5 Sasaran Kegiatan (SK-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dilingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

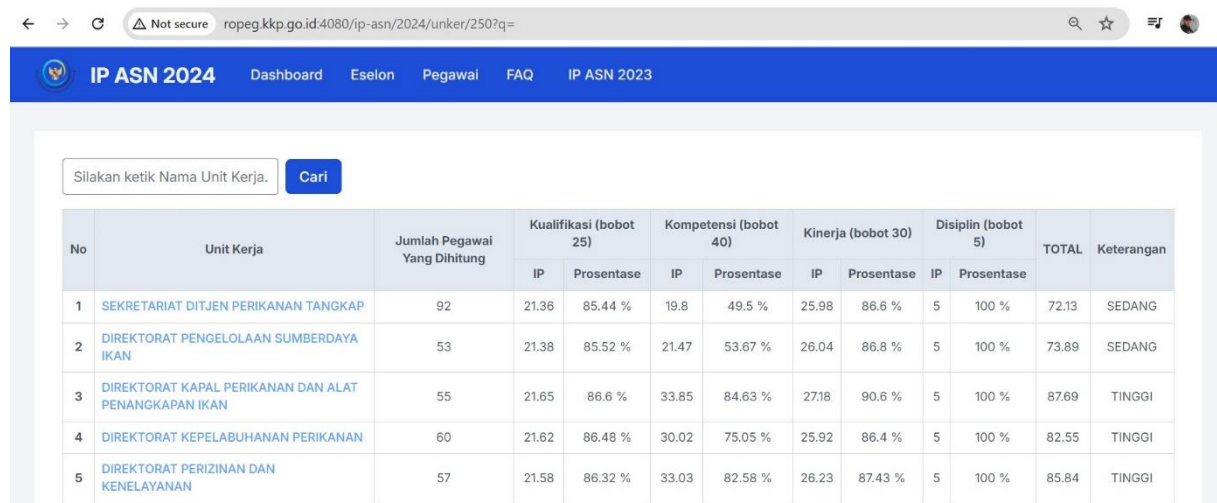
A. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Sedangkan dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus. Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi ke pegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP.

Tantangan dalam pencapaian IKU ini salah satunya yaitu terkait sisi pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih *user friendly*. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai KKP, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai.

Pada semester II, IP ASN Direktorat Kelautan Perikanan telah mencapai nilai 82,55 dengan kategori Tinggi berdasarkan aplikasi <https://ropeg.kkp.go.id/>



Silakan ketik Nama Unit Kerja.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	92	21.36	85.44 %	19.8	49.5 %	25.98	86.6 %	5	100 %	72.13	SEDANG
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	53	21.38	85.52 %	21.47	53.67 %	26.04	86.8 %	5	100 %	73.89	SEDANG
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	55	21.65	86.6 %	33.85	84.63 %	27.18	90.6 %	5	100 %	87.69	TINGGI
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	60	21.62	86.48 %	30.02	75.05 %	25.92	86.4 %	5	100 %	82.55	TINGGI
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	57	21.58	86.32 %	33.03	82.58 %	26.23	87.43 %	5	100 %	85.84	TINGGI

Gambar 5. IP ASN Tahun 2024 Direktorat Kelautan Perikanan pada Semester I Tahun 2024

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024)

B. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kelautan Perikanan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kelautan Perikanan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelautan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari rekonsiliasi kinerja adalah untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

- a. Output yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelautan Perikanan yaitu
 - Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian dan ketepatan masing-masing unit kerja;
 - Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon, dan;
 - Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.

- b. Dokumen yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja:
- Perjanjian Kinerja (PK)
 - Manual IKU
 - Rincian Target IKU
 - Rencana Aksi (Renaksi)
 - Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I, II, dan III
 - Dokumen data Dukung Lkj Triwulan III
- c. Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP (kinerja) di Dit. Kelabuhanan Perikanan, yaitu:
- Perencanaan Kinerja;
 - Pengukuran Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja;
 - Evaluasi Kinerja, dan;
 - Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Pada tingkat eselon II KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh secara internal lingkup eselon I. Target indikator nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan pada 2024 adalah 94%. Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat diperoleh dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

C. Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penilaian Capaian IKU MP dengan menggunakan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>)

Target Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar pada Direktorat Kelabuhanan Perikanan adalah sebesar 94%. Pada Triwulan II Tahun 2024, capaian MP Direktorat Kelabuhanan Perikanan adalah sebesar 133,33%, dengan persentase capaian terhadap target sebesar 120 %. Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, nomor 2452/SJ.7/TU.210/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024, perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 9. Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sampai dengan triwulan I tahun 2024

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan I	% Capaian
Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	94	133,33	120

(Sumber: Direktorat Kelabuhanan Perikanan, 2024)

Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sampai dengan triwulan II tahun 2024

SS 5 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kelabuhanan Perikanan												
IKU 20 Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)												
Realisasi TW III 2019-2023					Realisasi 2024					Renstra DJPT		
TW II 2019	TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target TW II 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra	
			0	-	94	94	133,33	120	120	94	120	

(Sumber: Direktorat Kelabuhanan Perikanan, 2024)

D. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan

Indikator ini menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan kepada Direktorat Kelabuhanan Perikanan berdasarkan LHP yang terbit pada Triwulan I Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang dokumennya telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) oleh Direktorat Kelabuhanan Perikanan.

Target Capaian IKU rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan adalah sebesar 80%. Berdasarkan pengukuran, didapatkan capaian Triwulan II Tahun 2024 Direktorat Kelabuhanan Perikanan sebesar 104,63%, dengan persentase capaian terhadap target sebesar 104,54%.

Tabel 11. Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan” sampai dengan triwulan II tahun 2024

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan	80	104,17	120

(Sumber: Direktorat Kelabuhanan Perikanan, 2024)

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan” sampai dengan triwulan II tahun 2024

SS 5 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kelabuhanan Perikanan												
IKU 21 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan (persen)												
Realisasi TW I 2019-2023					Realisasi 2024					Renstra DJPT		
TW II 2019	TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target TW II 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra	
-	-	100	100	100	80	80	104,17	120	120			

(Sumber: Direktorat Kelabuhanan Perikanan, 2024)

E. Kinerja Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp118.869.120.00 dengan total anggaran blokir Rp27.388.500 (blokir AA dan blokir kekurangan data dukung), sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan adalah Rp91.480.270.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Penetapan Anggaran Direktorat KP Tahun 2024.

Sumber Anggaran	Pagu Awal	Blokir dan AA	Pagu Akhir	Bobot Anggaran
RM	62.397.120.000	14.700.000.000	47.697.120.000	52,14
PNBP	7.700.000.000	-	7.700.000.000	8,42
PHLN	48.772.000.000	12.688.850.000	36.083.150.000	39,44
Total	118.869.120.000	27.388.850.000	91.480.270.000	100,00

Sampai dengan tanggal 28 Juni 2024, realisasi anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan (2338) Rp24.959.998.641 atau 27,28% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Anggaran

Sumber Anggaran	Pagu Akhir	Realisasi	%	Sisa
RM	47.697.120.000	22.671.331.301	47,53	25.025.788.699
PNBP	7.700.000.000	5.066.000	0,07	7.694.934.000
PHLN	36.083.150.000	2.283.601.340	6,33	33.799.548.660
Total	91.480.270.000	24.959.998.641	27,28	66.520.271.359

Jumlah anggaran yang belum direalisasikan sebagaimana tabel 2, akan dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Sumber Anggaran Rupiah Murni (RM)

Berdasarkan sisa anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang bersumber dari RM Rp25.025.788.699, sebagian besar telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Tangkap meliputi:

- 1) Pembayaran gaji petugas pendataan Rp13.463.106.373;
- 2) Pelaksanaan detasering SPT 5 Periode 29 April-28 Mei 2024 Rp1.115.854.673;
- 3) Pembangunan 5 unit Kantor Pelayanan Kesyahbandaran dan PNBP Pasca Produksi Rp1.720.095.585;
- 4) Pengadaan 2 (dua) unit ponton Rp3.275.000.000; dan
- 5) Kegiatan pendukung kebijakan prioritas DJPT lainnya di Semester II Rp 5.451.732.068.

Kegiatan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menggunakan sumber anggaran RM secara rinci disampaikan pada tabel 15 sebagai berikut:

Tabel.15 Target Realisasi Alokasi RM Dit Kepelabuhanan Perikanan Semester II TA 2024

No	Nama Kegiatan	Rencana Pelaksanaan Sisa Anggaran	Timja Pelaksana
1	Pembangunan Kantor Pelayanan Kesyahbandaran dan PNBP Pascaproduksi di Pelabuhan Perikanan	1.720.095.585	AKP4
2	Pelaksanaan pengadaan sarana penunjang operasional pelabuhan pangkalan dalam rangka mendukung penarikan PNBP Pascaproduksi (pengadaan ponton)	3.275.000.000	AKP4
3	Kegiatan pendukung kebijakan Prioritas DJPT	200.625.000	AKP4
4	Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya dan WKOPP	293.706.573	AKP4
5	Penyusunan Dokumen Andalalin Pelabuhan Perikanan Untia	218.470.000	AKP4
6	Petugas mutu di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	287.000.000	TOPP
7	Pelaksanaan perusahaan Pelabuhan Perikanan	134.249.852	TOPP
8	Kegiatan Pendukung Kebijakan Prioritas DJPT	200.000.000	TOPP
9	Pembinaan Pelaksanaan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), penerapan ISO, perusahaan pelabuhan, dan pembinaan SPBUN dan SPDN	249.216.830	TOPP
10	Rapat Teknis Kesyahbandaran di Pelabuhan perikanan dalam rangka menuju penerapan PNBP Pasca produksi dan penangkapan terukur	462.855.000	KSB
11	Diseminasi SHTI di pelabuhan perikanan untuk dokumen ekspor hasil perikanan dan penerapan lembar awal di Pelabuhan Perikanan melalui aplikasi SHTI	77.600.000	KSB
12	Kegiatan syahbandar (supervisi, desiminasi, SHTI dan PSM) di pelabuhan perikanan	269.796.447	KSB
13	Kegiatan Pendukung Kebijakan Prioritas DJPT	403.394.000	P3
14	Pembinaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Hibah Pemerintah Jepang	356.897.850	P3
15	Pendampingan Pelabuhan Perikanan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	750.721.809	P3
16	Kegiatan Pendukung Kebijakan Prioritas DJPT	100.548.000	P3
17	Penyiapan Tenaga Pendataan PJLP	13.463.106.373	PIT
18	Pelaksanaan Detasering (SPT 5 periode 29 April-28 Mei 2024)	1.115.854.673	PIT
19	Supervisi dan Pendampingan Pelabuhan Pangkalan Penangkapan Ikan Terukur	184.896.850	PIT
20	Penyusunan Revisi Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan	91.720.000	PAKP
21	Pengelolaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	129.117.600	PAKP
22	Integrasi Sistem Informasi Tata Kelola Kepelabuhanan Perikanan	204.950.000	PAKP
23	Pelaksanaan PIPP di Pelabuhan Perikanan	187.920.000	PAKP
24	Pemantauan dan evaluasi Kepelabuhanan Perikanan	71.231.705	PAKP
25	Operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik, Merauke, Morotai, Natuna dan Saumlaki	420.311.784	SKPT
26	Dukungan Penyiapan dan Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN)	156.502.768	P4LN
	Jumlah	25.025.788.699	

b. Sumber Anggaran PNBP

Pagu anggaran Direktorat Kepelabuhan Perikanan Tahun 2024 yang bersumber dari PNBP Rp7.700.000.000, dengan realisasi sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 Rp5.066.000 (0,07%). Sisa anggaran yang bersumber dari PNBP Rp7.694.934.000 sebagian besar alokasi akan diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan Bimtek Kepelabuhanan Perikanan Rp2.494.934.000 dan kegiatan lainnya meliputi:

Tabel.16 Target Realisasi Alokasi PNBP Dit Kepelabuhanan Perikanan Semester II TA 2024

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Timja Pelaksana
1	Pengelola pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan	700.000.000	AKP4
2	Kajian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	200.000.000	AKP4
3	Bimbingan Teknis Kepelabuhanan Perikanan	2.494.934.000	TOPP
4	Peningkatan Petugas kesyahbandar di pelabuhan perikanan	700.000.000	KSB
5	Workshop dan Sosialisasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	700.000.000	PAKP
6	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Perintis (Untia)	1.500.000.000	P3
7	Bimbingan Teknis Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	475.600.000	P3
8	Bimbingan Teknis K3 Pelabuhan Perikanan / K3 Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	224.400.000	P3
9	Bimbingan Teknis Petugas Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Pangkalan PIT dan PNBP Pasca Tahap I (Wilayah Barat)	700.000.000	PIT
	Jumlah	7.694.934.000	

c. Sumber Anggaran PHLN

Pagu anggaran Direktorat Kepelabuhan Perikanan Tahun 2024 yang bersumber dari PHLN Rp36.083.150.000 dengan realisasi sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 Rp 2.283.601.340 (6,33%). Sisa anggaran PHLN Rp33.799.548.660 sebagian besar telah dialokasikan untuk:

- 1) Jasa konsultasi perencanaan 1) Proyek *Eco Fishing Port* Rp12.642.860.000 (TAO); dan 2) Proyek *Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase I* Rp7.103.460.000 (PMC);
- 2) Kegiatan pendukung proyek *Eco Fishing Port* Rp8.981.502.220 (penyiapan *master plan*, penguatan peran pengelola PP);
- 3) Kegiatan pendukung proyek *Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase I* Rp1.889.425.000 (*Institutional strengthening, start up workshop, Equipment*);
- 4) Kesekretariatan (PMU) Rp3.182.301.440.

Rincian kegiatan dari alokasi anggaran PHLN disampaikan pada Tabel.5 sebagai berikut:

Tabel.17 Target Realisasi Alokasi PHLN Dit Kepelabuhanan Perikanan Semester II TA 2024

No	Nama Kegiatan	Sisa Anggaran	Timja Pelaksana
1	Equipment	1.400.000.000	P4LN
2	Consulting Services (Jasa Konsultan Pelaksanaan Proyek)	7.103.460.000	P4LN
3	Institutional Strengthening (Penguatan Kapasitas Kelembagan dan SDM)	345.940.000	P4LN
4	Project Management Unit (Keseekretariatan Pelaksanaan Proyek)	1.514.161.795	P4LN
5	Start Up Workshop	143.485.000	P4LN
6	Penyiapan Komponen Implementasi Pendekatan Keberlanjutan untuk Pelabuhan Perikanan Proyek Eco Fishing Port	12.642.860.000	P4LN
7	Penyusunan masterplan pelabuhan perikanan nasional	2.900.000.000	P4LN
8	Penguatan peran Pengelola Pelabuhan dan pelaksanaan pengelolaan pelabuhan yang inklusif	6.081.502.220	P4LN
9	Project Management Unit (Keseekretariatan Pelaksanaan Proyek)	1.668.139.645	P4LN
	Jumlah	33.799.548.660	

Berdasarkan rencana pelaksanaan sisa anggaran sebagaimana Angka 3, anggaran dengan sumber PNBPN alokasi penggunaannya dipengaruhi oleh realisasi atas capaian target PNBPN Sumber Daya Alam. Adapun anggaran dengan sumber PHLN alokasi penggunaannya akan bersifat sangat terbatas dan mengacu pada kebijakan lender PHLN.

Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, serta kebijakan terkait rencana perpanjangan pelaksanaan Detasering dari bulan Juni-Desember 2024, terdapat kebutuhan anggaran Rp9.800.000.000 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) yang belum teralokasikan sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya melalui Memorandum Nomor:1307/DJPT.4/RC.410/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unit eselon II di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kelautan dan Perikanan berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Rencana strategis KKP, Rencana strategis DJPT, dan perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kelautan dan Perikanan triwulan II Tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama triwulan II. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya pada triwulan II sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Terdapat cara perhitungan baru pada tahun 2024, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IKU yang belum memenuhi target pada triwulan II, lebih disebabkan oleh kendala non teknis, karena IKU tersebut pengukurannya bersifat tahunan. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kelautan dan Perikanan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU agar dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya. Tindaklanjutnya melaksanakan rapat koordinasi terkait percepatan penyelesaian kegiatan pendukung IKU lingkup Direktorat Kelautan dan Perikanan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada triwulan II sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun. Tindaklanjutnya membuat jadwal perencanaan kegiatan untuk triwulan, semester.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal triwulan II. Tindaklanjutnya konsisten terhadap jadwal pelaksanaan yang telah dibuat.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Direktorat Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Direktur Kelautan dan Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.